



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 8/PHPU.D-XII/2014**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERKARA
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 28 APRIL 2014



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 8/PHPU.D-XII/2014

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2014

PEMOHON

1. H. Herman H.N. dan Zainudin Hasan (Nomor Urut 3)

TERMOHON

KPU Provinsi Lampung

ACARA

Pemeriksaan Perkara (I)

Senin, 28 April 2014, Pukul 11.00 – 11.36 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Ahmad Fadlil Sumadi | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Fadzlun Budi S.N.
Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Agus Bhakti Nugroho
2. M. Maulana Bungaran
3. Muhammad Yunus
4. Alex Chandra
5. Habiburokhman

B. Termohon:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Nanang Trenggono | (Ketua KPU Provinsi Lampung) |
| 2. Sholihin | (Anggota KPU Provinsi Lampung) |
| 3. Handi Mulyaningsih | (Anggota KPU Provinsi Lampung) |

C. Kuasa Hukum Termohon:

1. Rozali Umar
2. Frans Handrajadi
3. Waris Basuki
4. M. Ridho

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Ahmad Handoko
2. Abis Hasan Mu'an

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.00 WIB

1. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang untuk Perkara Nomor 8/PHPU.D-XII/2014 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-Saudara, sidang kali ini adalah sidang berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang acaranya adalah pemeriksaan pendahuluan. Dalam pemeriksaan pendahuluan ini, Saudara nanti akan dilakukan pengecekan permohonannya. Dan setelah itu, manakala ada hal-hal yang tidak lengkap atau tidak jelas, Saudara akan diberikan nasihat.

Untuk itu, Termohon maupun kalau ada Pihak Terkait belum punya waktu untuk berbicara, oleh karena itu, silakan pergunakan baik-baik untuk mengantisipasi apa yang harus Anda lakukan setelah nanti dia memperbaiki permohonannya. Karena perbaikan biasanya tidak jauh-jauh dari apa yang sudah disampaikan.

Namun, dalam meja ini, Saudara mengajukan ... sudah mengajukan perbaikan, ya? Yang diterima di MK tanggal 28, bulan April?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO

Ya.

3. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Hari ini?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO

Ya, yang ... perbaikan yang terakhir.

5. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Perbaikan yang terakhir. Jakarta, 21 April itu, ya? Tahun 2014, tanggal 28 April 2014, diterima di Mahkamah, ya?

Saudara Termohon, sudah mendapatkan?

6. KUASA HUKUM TERMOHON: M. RIDHO

Sudah, Yang Mulia.

7. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saudara Pihak Terkait, sudah mendapatkan?

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ABIS HASAN MU'AN

Kami mendapatkan tertanggal 21 April.

9. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, sama, sama dengan yang saya punya.

Oke. Sebelumnya, ini yang suka bikin kacau di Mahkamah ini adalah soal independensi Mahkamah ini sebenarnya mewajibkan Hakim untuk menjaganya dan melarang Saudara untuk menghubungi Hakim atau siapa pun di Mahkamah ini untuk kemenangan Saudara. Apakah Saudara ada yang menghubungi Saudara atau Saudara menghubungi Mahkamah?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO

Tidak ada.

11. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Selanjutnya, teruskan saja, tidak usah dihubungi. Saudara Termohon, ada?

12. KUASA HUKUM TERMOHON: M. RIDHO

Tidak ada, Yang Mulia.

13. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Saudara Pihak Terkait?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ABIS HASAN MU'AN

Tidak ada, Yang Mulia.

15. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Saya senang mendengarnya dan mudah-mudahan kami berkewajiban menjaga, Saudara dilarang menghubungi.

Oleh karena itu, sekali lagi, pertahankan itu dengan baik. Karena independensi itu merupakan kebutuhan bangsa ini, bukan kebutuhan Hakim, dan kebutuhan Saudara saja, kebutuhan Republik Indonesia.

Oke. Untuk jelasnya, silakan Saudara baca garis besarnya karena saya sudah dapat ... kami ini sudah dapat yang tertulis. Garis besarnya apa yang Saudara mohon, yang terakhir diperbaiki? Silakan dimulai.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera, salam damai bagi kita semua.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk Perkara Nomor 8/PHPU.D-XII/2014. Baik, kami akan menyampaikan pokok-pokok perubahan yang terakhir berkaitan dengan pelanggaran dalam tahapan pelaksanaan pemilukada.

Yang pertama, tidak adanya penetapan DPT pilgub. Ini hal yang paling prinsip, yang paling mendasar, Termohon sungguh sangat berani untuk tidak menetapkan itu, padahal ada amanah undang-undang. Dan carut-marutnya pelaksanaan Pilgub Lampung dengan Pileg berbarengan, kemarin ditandai bahwa ada belum diterimanya laporan KPU Lampung sampai ditunda sampai tanggal 6 Mei 2014.

Kemudian, selanjutnya, Yang Mulia, perlu kami sampaikan pada Termohon dan Pihak Terkait. Berkaitan dengan keberatan penghitungan ulang yang dilakukan oleh seluruh Saksi Pemohon yang ada se-Provinsi Lampung dan kami sudah berhasil membuka sembilan TPS. Ternyata dari sembilan TPS, yang kemudian dihentikan, disetop oleh Termohon itu, kami Pihak Pemohon bertambah 218 suara.

17. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sebentar, Saudara bilang (suara tidak terdengar jelas) yang Saudara ... yang dilakukan oleh saksi itu Saudara?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO

Ya, Yang Mulia?

19. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Penghitung ulang yang dilakukan oleh saksi Saudara?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO
Bukan, dilakukan oleh PPK, sudah ada.
21. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI
Oleh PPK (...)
22. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO
Ya. Ada di dalam bukti, Yang Mulia.
23. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI
Di mana? PPK mana?
24. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO
Bukti P-50, P-51, dan P-52 di Kelurahan Gulak Galik, Kelurahan Kupang Kota, di Kecamatan Telukbetung Utara.
25. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI
3 kelurahan, ya?
26. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO
Ya. Karena setelah itu disetop.
27. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI
Itu berapa TPS?
28. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO
Yang berhasil kami buka hanya 9.
29. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI
9 TPS di 3 kelurahan itu?
30. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO
Ya.

31. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Masing-masing 3 kalau begitu?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO

4, Yang Mulia. Karena setelah itu disetop, sempat kaos malam itu.

33. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sebentar! Saudara sudah jelaskan mengapa dihitung ulang, mengapa disetop?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO

Yang kami jelaskan dalam permohonan ini, yang pertama bahwa panitia pelaksana itu untuk menentukan suara sah dan tidak sah, itu berbeda. Padahal ada surat edaran dari Saudara Termohon yang menyampaikan bahwa surat suara yang mencoblos di luar dari kotak suara tetap dinyatakan sah asal tidak mengenai salah satu calon yang lain. Ternyata pada saat Nomor 3, Pemohon itu dinyatakan tidak sah.

35. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, ya, terus, apa lagi?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO

Kemudian yang ... perubahan yang kami sampaikan adalah keberatan seluruh ini, Yang Mulia, seluruh saksi kami, saksi Pemohon.

37. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Mengapa? Apa halnya keberatan itu?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO

Ya untuk penghitungan ulang, di luar 9 TPS itu ditolak, tidak ada yang dikabulkan.

39. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Jadi Saudara memohon supaya seluruh Lampung itu dihitung ulang, tapi yang dikabulkan hanya 9 itu dan selainnya ditolak?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO

Ya.

41. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO

Itupun melalui perjuangan yang sungguh ekstra keras.

43. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, ya. Terus, apa lagi?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO

Kalau yang prinsip, penambahannya itu saja, Yang Mulia.

45. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Itu saja, ya. Secara keseluruhan, yang dipersoalkan Saudara ada berapa TPS, atau ada berapa PPK, atau ada berapa PPS?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO

Yang kami persoalkan 16.492 TPS itu se-Lampung, Yang Mulia.

47. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Se-Lampung? Saudara mempersoalkan seluruh TPS di Lampung?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO

Ya. Kenapa kami persoalkan, Yang Mulia? Yang pertama, ada indikasi penggelembungan suara karena suara yang digunakan dengan suara yang tidak terpakai dan tidak sah, itu ada selisih, kecuali di satu kabupaten yang nol, selebihnya ada.

49. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO

Itu satu. Kemudian yang kedua (...)

51. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ada matriksnya, ya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO

Ada, ada, Yang Mulia.

53. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO

Yang kedua, berkaitan dengan tidak ... mohon maaf, banyaknya C-1 yang fotokopi.

55. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

C-1 fotokopi.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO

Ya. Ini hampir menyeluruh terjadi di se-Provinsi Lampung ini, Yang Mulia.

57. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Terus?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO

Kemudian, yang kami permasalahan sebagaimana amanah undang-undang adalah tidak adanya C-6 selaku undangan resmi untuk pelaksanaan pilgub, sehingga masyarakat ini banyak yang tidak hadir.

59. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Di mana saja Saudara persoalkan?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO

Itu seluruhnya, hanya diganti dengan iklan satu halaman di koran dan koran tidak menjangkau daerah-daerah yang paling dalam.

Nah, jadi dari tidak ada, kemudian ada selisih suara, itulah yang kami duga, sebagaimana ... karena ini pertama kali di Lampung, Yang Mulia, Pileg dan Pilgub bersamaan, belum pernah terjadi, baru di Provinsi Lampung. Kalau Pilegnya saja bermasalah dan oleh KPU RI itu ditunda tidak dapat diterima laporan Termohon kemarin, dengan hari yang sama, dengan pelaksanaan yang sama, dengan waktu yang sama, kami hakuyakin bahwa pelaksanaan carut-marutnya Pilgub Lampung ini tidak bisa dipertanggungjawabkan.

61. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Soal keyakinan itu, kan harus dibangun berdasarkan bukti.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO

Ya, Yang Mulia.

63. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Pada saatnya, Saudara harus membuktikannya, ya!

64. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO

Siap, Yang Mulia.

65. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Cukup? Ada lagi?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO

Kemudian ini, Yang Mulia, tidak dilaksanakan untuk pelaksanaan Pilgub ini, sebagaimana amanah undang-undang, itu harus dilaksanakan bimtek. Untuk pelaksanaan teknik mulai dari KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan pegawai TPS, sebagaimana amanah undang-undang karena berbarengan dengan pileg, mereka dikumpulkan satu hari, sehingga dalam menerjemahkan, baik itu maunya KPU Pusat, KPU Lampung, itu beda-beda. Sebagai contoh, ada instruksi dari Saudara Termohon Ketua Komisioner bahwa pelaksanaan pilgub karena berbarengan dengan agenda nasional, itu ditetapkan penghitungannya adalah setelah

penghitungan Pileg selesai, tapi ternyata, bukti kami, saksi kami banyak yang dilakukan sebelum penghitungan Pileg. Ini ada apa?

67. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ada jadwal tahapan?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO

Ada.

69. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Nanti lampirkan ya! Ada lagi apa sudah cukup? Kalau cukup, petitumnya apa?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO

Ya, yang kami permasalahan lagi, yang paling utama sebenarnya, Yang Mulia. Ada sebuah korporasi, sebagaimana di batasan dalam undang-undang itu, ada bantuan perusahaan itu tidak boleh dari Rp350 juta, tapi ini secara masif terjadi di seluruh Lampung ribuan ton gula, ribuan truk itu tidak ada satu pun yang kemudian oleh panwas sudah kita laporkan temuan itu, kemudian dilanjutkan kepada perkara Gakkumdu, tidak ada. Yang punya adalah Sugar Group Company, Vice President-nya adalah ayah dari calon gubernur yang menurut Termohon sudah ditetapkan menjadi pemenang. Bukti saksi ada.

71. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Selain saksi juga, kaitan itu kan bisa dibuktikan dengan dokumen bahwa pihak yang terkait yang menang itu adalah anak dari seorang ayah yang merupakan presiden dari perusahaan itu.

Oke, apa lagi? Cukup? Kalau cukup, lalu petitumnya apa?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO

Yang Mulia, masih ada satu sebelum ke petitum.

73. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, satu lagi?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO

Ya.

75. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, yang halaman berapa itu?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO

Money politics yang dilakukan, itu sungguh amat dasyat, Yang Mulia. Yang pertama, memang di-support oleh seorang Kepala Daerah Bupati Tulang Bawang, Wakil Bupati Tulang Bawang, Wakil Bupati Tulang Barat, itu sungguh luar biasa. Kami ada buktinya semua, ada videonya, baik itu pada saat pelaksanaan dan di hari tenang.

Baik, petitumnya. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, sekiranya dapat memberikan putusan primer, menerima, mengabulkan permohonan yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya.

Kemudian yang kedua, membatalkan Berita Acara KPU Provinsi Lampung Nomor 35/BA/IV/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Periode 2014-2019.

Tiga, membatalkan keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 48/KPTS/KPU-Prov-008/2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Periode 2014-2019.

Empat, menyatakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Provinsi Lampung Periode 2014-2019 Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Ridho Ficardo, S.Pi., M.Si. dan Bakhtiar, S.H., M.M., didiskualifikasi dan menetapkan Calon Nomor Urut 3 Drs. Herman H.N., M.M. dan Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H., M.M., sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019.

Atau setidaknya memerintahkan pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 Nomor Urut 2 atas nama Ridho Ficardo, S.Pi., M.Si. dan Bakhtiar, S.H., M.M., sejak putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.

Subsider, apabila Majelis Mahkamah Konstitusi memiliki pertimbangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kuasa Pemohon Habiburrahman ditandatangani, Agus Bhakti Nugroho ditandatangani, Muhammad Yunus, S.H. ditandatangani, M. Maulana Bungaran, S.H., ditandatangani, Yeni Wahyuni, S.H.,

ditandatangani, Alex Chandra, S.H. ditandatangani, Resmen Kadafi, S.H., ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

Wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr.wb.

77. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Walaikumsalam wr. wb. Ini Termohon sudah paham ya, apa yang dimohon dan dalilnya ditujukan kepada Saudara dan sebagian juga ditujukan kepada Pihak Terkait untuk disiapkan sejak sekarang, bagaimana respons Saudara pada saatnya nanti, tidak sekarang, gitu ya. Sekarang, dengarkan saja.

Saudara Panitera, ada bukti-bukti yang dilampirkan oleh Pemohon? Oke, sebelum saya periksa bukti-bukti yang sudah dilampirkan, maka saya akan bertanya kepada Saudara, apakah Saudara masih memerlukan untuk diberikan nasihat Hakim, hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Saudara? Apa sudah cukup?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO

Masih, Yang Mulia. Kami kembalikan kepada Yang Mulia Majelis. Terima kasih.

79. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Disilakan, Yang Mulia Prof. Aswanto.

80. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Pemohon, walaupun Saudara sudah memasukkan perbaikan ya, masih ada beberapa catatan-catatan. Saya mulai dari yang pertama, di surat kuasa Saudara itu ada 11 orang, ya. Kemudian, di permohonan Saudara juga di bagian depan itu ada 11 orang penerima kuasa. Lalu, di bagian belakang yang menandatangani permohonan Saudara ini tinggal tujuh orang. Kuasanya tujuh atau 11?

81. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO

Tujuh, Yang Mulia, yang terakhir.

82. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Tujuh?

83. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO

Ya.

84. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ya, dipastikan. Karena di perbaikan juga masih tetap mencantumkan 11 nama kuasa di bagian depan, tapi pada bagian belakang yang bertanda tangan hanya tujuh orang, gitu ya. Jadi, perlu dipastikan, ya. Jadi, tujuh saja, ya? Tujuh saja, ya. Tentu yang bertanda tangan di halaman belakang, ya? Baik.

Nah, selanjutnya, Anda mendalilkan tadi ada kecurigaan bahwa sebuah perusahaan, yaitu Sugar Group Company, Sugar Group Company ini dianggap melakukan money politics, gitu ya. Di bukti-bukti Saudara sebenarnya sudah Saudara lampirkan ya, tapi sebenarnya, mestinya bukti bahwa ... bukan bukti bahwa ada kegiatan jalan sehat, konser, dan lain-lain sebagainya, mestinya yang Saudara harus tegaskan di situ adalah apakah betul dana yang digunakan itu adalah dana dari perusahaan dan memang ditujukan untuk pemilih agar memilih calon tertentu, gitu ya. Ini bukti-bukti Saudara cuma kegiatan-kegiatannya saja yang Saudara tampilkan, ya.

Kemudian di berikutnya, ini di poin 91 halaman 21 ya, Saudara mempersoalkan bahwa tidak ada DPT atau DPT yang digunakan adalah DPT Pileg dan Saudara me-break down ketentuan undang-undang bahwa ada perbedaan persyaratan untuk pemilih legislatif dan pemilih gubernur, dimana pemilih gubernur harus berdomisili minimal 6 bulan di wilayah hukum daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan gubernur, tapi mestinya Saudara juga menunjukkan bahwa memang karena Anda mendalilkan bahwa ditengarai ada yang ikut memilih yang semestinya tidak punya hak pilih, gitu ya. Karena dia tidak berdomisili 6 bulan minimal di daerah wilayah pemilihan.

Ini mestinya tidak hanya berspekulasi, tidak hanya mengandai-andai, gitu ya. Ini mestinya Anda bisa membuktikan bahwa si A, si B, yang mestinya tidak punya hak pilih, tapi kemudian dia menggunakan atau ikut memilih, gitu ya.

Banyak yang Saudara dalilkan, tapi buktinya karena bukti Saudara sudah masuk, buktinya tidak konkret ya, nanti coba diperhatikan itu, ya!
Cukup, Yang Mulia.

85. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Selanjutnya, silakan, Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams.

86. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Yang Mulia. Satu hal yang ingin saya beri catatan dalam permohonan ini, nampaknya Pemohon sudah ... posita lebih banyak menguraikan mengenai adanya pelanggaran tanpa menyebutkan berapa perolehan suara yang seharusnya diterima oleh Pemohon, yang saya tidak dapatkan ya. Saya kira itu saja.

87. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saudara Pemohon, terakhir dari saya, juga untuk menjadi perhatian Saudara, Termohon, dan Pihak Terkait.

Begini. Saudara sudah melakukan grouping ya, pengelompokan terhadap alasan yang Saudara jadikan dasar permohonan atau posita tadi disebutkan oleh Yang Mulia rekan saya.

Dalam pemilu atau pemilukada, itu suatu pelanggaran, itu mesti berkaitan dengan perolehan suara dan kaitan antara pelanggaran dengan perolehan suara, itu punya signifikansi yang sedemikian rupa, yang kalau itu benar, maka yang menang sebenarnya Saudara, begitu. Nah ini, itu bagaimana Saudara konstruksikan di dalam permohonan Saudara yang dari argumentasi yang sudah dikelompokkan tadi. Itu satu hal. Catatan yang mesti menjadi perhatian Saudara supaya Termohon dan Pihak Terkait meresponsnya juga mudah. Itu satu hal.

Yang kedua, pelanggaran itu ada waktunya, ada tempusnya, dan ada tempat kejadiannya, gitu ya, locus-nya. Dalam pengertian signifikansi, di sini juga harus ditegaskan bahwa dari tempus dan locus-nya, itulah yang sebenarnya tempat perolehan Saudara yang dianggap sebenarnya lebih dari perolehan Pihak Terkait, seandainya tidak ada pelanggaran itu, gitu. Nah itu belum tergambar, belum tergambar. Jadi ini yang kedua menjadi penting bahwa ada tempus, ada locus, di situ menjadi poin bagi perolehan Saudara yang kalau itu tidak terjadi di situ, Saudara di situ menang, gitu ya. Itu ... di sini ... belum, belum dikaitkan seperti itu.

Kemudian yang terakhir, masih dalam soal posita. Bahwa pelanggaran itu kalau tidak dilakukan oleh Pihak Termohon, dilakukan oleh Pihak Terkait atau dilakukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait, atau paling tidak, pelanggaran itu ada di dalam ruang lingkup yang menjadi kewenangan Pihak Termohon. Artinya, Termohon dengan kekuasaannya sebagai penyelenggara, mestinya bisa menghentikan dia, gitu ya. Tapi tidak dihentikannya dan itu dibuktikan dengan apa? Saudara harus sudah punya itu, ya.

Nah, sekarang masuk kepada petitum. Petitum sudah benar, yang Saudara sudah sampaikan di sini bahwa Saudara minta dibatalkan itu hasil rekapnya itu.

Kemudian yang kedua, hasil rekap itu kan baru Berita Acara, pastikan bahwa KPU tidak membuat keputusan atau membuat keputusan tentang rekap ya. Biasanya ada model KPU itu, Berita Acara Sidang Pleno Rekap, lalu berdasarkan Berita Acara dibikin Keputusan Terpilih, gitu. Atau ada satu model lagi, KPU membikin Berita Acara Rekap berdasarkan Berita Acara Rekap ada keputusan mengenai rekap perolehan suara, setelah itu ada keputusan lagi mengenai terpilih, ini ada ndak? Kok saya baca cuma Berita Acara ya? Oke, ndak, ndak usah dijawab sekarang, pastikan saja, supaya dia juga tahu semua ini, tahu semua, ya.

Saudara minta Saudara dinyatakan sebagai pemenang. Saya mau tanya, kalau berita rekapnya dibatalkan, Saudara mau menang dari mana? Itu ... rekap itu kan hasil perolehan suara masing-masing, termasuk punya Saudara, Saudara minta dibatalkan, tapi Saudara minta dimenangkan berdasarkan rekap, lalu bagaimana? Mestinya ada kalimat-kalimat lain yang sedemikian rupa, dipastikan bahwa seperti apa petitum itu, ya? Oke, pastikan seperti itu!

Karena kalau hanya itu, kontradiktif antara poin yang sekian dengan poin yang minta Saudara dinyatakan ... itu yang dinyatakan menang Pemohon Nomor 3 itu ... apa ... Pasangan Nomor 3 itu kan Pemohon, ya? Ya itu, seperti apa mintanya seharusnya?

Kemudian ada permohonan Saudara menyatakan ... supaya Mahkamah menyatakan siapa itu ... Pihak Terkait. Pihak Terkait, ya? Itu didiskualifikasi, yang melakukan diskualifikasi siapa? Yang Saudara harapkan untuk melakukan diskualifikasi terhadap Pihak Terkait siapa? Apa Mahkamah, apa KPU? Di sini kalau Mahkamah menyatakan didiskualifikasi, itu kan artinya ada pihak di luar Mahkamah itu yang menyatakan dia diskualifikasi. Coba itu dipertimbangkan, ya. Ini soal yang penting, yang harus dipahami oleh semua, sehingga silakan nanti dia perbaikannya seperti apa, akan kami berikan waktu.

Cukup saya kira dari saya, sekarang alat bukti yang Saudara ajukan, ini ada sampai dengan P-25. Lalu dalam perbaikan, Saudara menambah menjadi berapa itu? P-46? Benar, ya? Dan nanti Saudara Panitera di ... apa namanya ... atau Saudara Termohon dan Pihak Terkait minta di ... apa namanya ... des Mahkamah Konstitusi untuk ... kalau belum punya ini karena Saudara untuk me-counter itu mesti punya dulu, ya, supaya diminta.

Dengan demikian, ini bukti-bukti saya nyatakan sah untuk diperiksa terlebih dulu.

KETUK PALU 1X

Saya kira sudah cukup dan Saudara Panitera, kapan di ... Saudara akan diberi waktu, Saudara masih mau memperbaiki kalau begitu? Berarti (...)

88. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO

Ya, Yang Mulia (...)

89. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Jam 09.00 WIB, Saudara harus sudah selesai perbaikan itu dan diserahkan kepada Mahkamah ya, besok. Ini kan baru ... sudah 11.30 WIB, masih ada waktu lagi. Jam 09.00 WIB, hari Selasa itu harus sudah selesai dan diserahkan di Mahkamah paling lambat itu jam 09.00 WIB, dan Termohon serta Pihak Terkait bisa meminta kepada Mahkamah di lantai 4, ya. Di lantai berapa? Di lantai dasar. Ya, nanti tanya kepada Kepaniteraan untuk minta perbaikannya itu, serta kalau bukti-bukti ini belum ada, Saudara bisa minta.

Untuk Pihak Terkait berlaku hal yang sama dan saya kira Pihak Terkait dan Pihak Termohon harus puasa bicara dulu, pada saatnya nanti Saudara akan diberikan waktu. Dan selanjutnya, hari Rabu, jam 09.00 WIB, sidang akan dibuka kembali, acaranya untuk mendengarkan respons Termohon dan Pihak Terkait. Serta Saudara kalau ada saksi untuk diperiksa, hari itu bisa diajukan. Saudara rencananya mau mengajukan saksi berapa?

90. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO

200-an, Majelis.

91. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Lho, saksi itu yang menentukan bukan jumlahnya lho. Karena minimal saksi itu 2. Katakan ada ... makanya penting tadi bagi locus dan tempus-nya, itu terkait dengan itu dua-dua saja sudah cukup, lebih-lebih kalau locus-nya itu sama, sebagian besar itu, enggak usah banyak-banyaklah. 15 saja saya anggap sudah banyak itu.

92. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO

Siap, Yang Mulia.

93. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

94. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO

Mungkin 50-an.

95. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

15 saja.

96. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO

Oh, baik, Yang Mulia.

97. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Nanti Saudara ... apa ... ngongkosi orang ke sini, nanti tidak diperiksa karena waktu kami akan kami pergunakan juga untuk yang lain juga, gitu ya?

98. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS BHAKTI NUGROHO

Siap, Yang Mulia.

99. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Jadi acaranya mendengar respons Termohon, respons Pihak Terkait, dan yang terakhir nanti mendengar saksi. Nah, itu pun nanti Saudara pilih mana yang sangat menentukan. Kepiawaian Saudara justru bagaimana menentukan hal yang Saudara dalilkan itu diperkuat oleh saksi itu. Saksi itu, oleh karena itu, mesti Saudara bikin matriks, nomor, nama, dan alamat, kemudian dia diminta untuk menyaksikan apa dalam kolom berikutnya, gitu. Sehingga, nanti diberikan kepada Termohon, kepada Terkait, Terkait juga meresponsnya enak karena ada matriksnya, gitu ya. Karena ini ... apa ... speedy trial ya, yang kita enggak bisa ... apa ... berleha-leha untuk memutuskan. Lebih-lebih, ini sebentar lagi ada pemilu legislatif, bersengketa lagi juga di sini, gitu, ya.

Saya kira sudah cukup dipahami, Saudara? Cukup ya. Oke, dengan demikian, sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.36 WIB

Jakarta, 28 April 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004